

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian suatu Negara sangat bergantung pada kondisi penerimaan negara tersebut. Salah satu penerimaan Negara dapat diperoleh dari pajak. Namun melihat tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap sistem perpajakan di Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan perubahan yang dapat meningkatkan kualitas perpajakan di Indonesia. Dengan adanya perbaikan pelayanan dan sistem yang ada maka pemerintah tidak perlu mengkhawatirkan akan terjadi penurunan kepatuhan membayar pajak yang dapat mengganggu kestabilan keuangan negara.

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak.

Salah satu penerimaan pajak yang cukup signifikan terhadap pendapatan Negara yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan RI, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik

hampir dua kali lipat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu dari Rp 123 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp 232,2 triliun pada tahun 2010. Angka ini kurang 30% dari total penerimaan Negara dari pajak. Untuk tahun 2011 penerimaan PPN mencapai 277,3 triliun, jika dibandingkan dengan penerimaan PPN tahun 2010, maka penerimaan PPN mengalami peningkatan, tetapi apabila dilihat dari perjenis pajaknya untuk tahun 2011, maka PPN memiliki pencapaian target paling rendah. Meskipun demikian, PPN mengalami kinerja pertumbuhan sebesar 20,45% yang tergolong relatif baik.

Kurang tercapainya penerimaan PPN disebabkan karena tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyetor PPN masih rendah dan juga masih banyak transaksi yang tidak tercatat atau yang dikenal dengan ekonomi bawah tanah, sehingga penerimaan PPN tidak mencapai target. Manurung (2002) menemukan bahwa sekitar 22% untuk setiap Kanwil Pajak terdapat Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bukan pembayar pajak (sumber laporpajak.com).

Sejak awal dekade 2000, “modernisasi” telah menjadi salah satu kata kunci yang melekat dan menjadi bahan pembicaraan di lingkungan Direktorat Jendral Pajak, Departemen Keuangan. Hal itu dilakukan yang bertujuan untuk menerapkan “*good governance*” dan “pelayanan prima” kepada masyarakat. Dari penelaahan atas tujuannya, terdapat beberapa kondisi menjelang dekade 2000 yang menjadi dasar sekaligus sasaran dari dilakukannya modernisasi perpajakan.

Rendahnya kepatuhan masyarakat melaksanakan kewajiban pajak seperti membayar pajak menjadi gambaran umum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kondisi atau indikator seperti berikut:

- Jumlah Wajib Pajak terdaftar masih rendah bila dibandingkan dengan potensi yang ada (*coverage ration*).
- Kepatuhan Wajib Pajak masih rendah yang tercermin dari pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Di antara indikatornya adalah penyampaian SPT baik masa maupun tahunan yang masih rendah.
- Realisasi penerimaan pajak setiap tahun yang belum menunjukkan tingkat optimalnya, dengan membandingkan kepada potensi yang ada. Sebagai indikatornya, realisasi dan peranan pajak terhadap APBN pada tahun 1998-2000 masih sekitar 50% hingga 60%.
- *Tax Ratio* sebagai salah satu indikator kinerja perpajakan di suatu Negara yang masih rendah sebagaimana dikemukakan banyak pihak. Ratio yang diperoleh dari perbandingan antara pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih jauh dibanding Negara lain.
- Tuntutan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan akurat merupakan harapan masyarakat, demikian juga perpajakan.

Dari kondisi di atas, oleh karena itu diperlukan perbaikan sistem penerimaan pajak serta perubahan-perubahan dalam segala aspek perpajakan yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Hal ini dapat dilakukan dengan penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fasmi&Misra (2012). Terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu pengambilan sampel yang berbeda dan variabel independen yang digunakan.

Fasmi dan Misra (2012) menggunakan empat variabel pengukuran yang terdiri dari struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi.

Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan merupakan modifikasi atas penggabungan variabel oleh penelitian sebelumnya, sehingga diperoleh tiga variabel independen yaitu restrukturisasi organisasi yang diperoleh dari struktur organisasi, proses bisnis yang diperoleh dari penggabungan prosedur organisasi dan strategi organisasi, serta manajemen sumber daya manusia yang diperoleh dari budaya organisasi. Hal ini dilakukan sebab mengacu pada konsep modernisasi dan reformasi perpajakan yang terdapat pada Pandiangan (2008).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian guna melengkapi penelitian sebelumnya yang berjudul : **“Pengaruh Pelaksanaan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebet- Jakarta Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah implementasi dari restrukturisasi organisasi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dalam membayar pajak?
2. Apakah penyempurnaan proses bisnis berpengaruh positif terhadap

tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dalam membayar pajak?

3. Apakah penyempurnaan manajemen sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan kena pajak dalam membayar pajak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif modernisasi administrasi perpajakan terhadap peningkatan kualitas pelayanan perpajakan.
2. Untuk mengetahui variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dalam membayar pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi pengusaha kena pajak dalam membayar kewajiban pajaknya sebagai dampak sistem modernisasi administrasi perpajakan.
3. Dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian lain dengan materi yang berhubungan dengan penelitian ini.